

STRATEGI FILIPINA DALAM MENGHADAPI AGRESIVITAS TIONGKOK DI KEPULAUAN SPRATLY

Andha Umar Auf Rabbani¹, Rendy Wirawan^{2✉}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2025-11-24 | Accepted 2025-11-25 | Published 2025-12-31

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly. Penulis menggunakan konsep *bandwagoning* untuk menjawab strategi Filipina. *Bandwagoning* merupakan sikap negara beraliansi dengan negara pengancam bagi negara pelaku *bandwagoning*. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, menggunakan data penelitian sekunder dan teknik analisis data dengan studi Pustaka. Terdapat 4 faktor dalam *bandwagoning* yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power* dan *aggressive intention*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor *geographic proximity* dan *aggressive intention* menunjukkan Tiongkok merupakan ancaman nyata bagi Filipina. Melalui faktor *aggregate power* dan *offensive power* menampilkan bahwa Tiongkok memiliki sumber daya yang besar sehingga Filipina memiliki peluang melakukan Kerjasama dengan Tiongkok agar mempertahankan Kepulauan Spratly, proses Kerjasama inilah yang disebut strategi *bandwagoning*. Kerjasama yang dilakukan Filipina melalui Kerjasama ekonomi dan keamanan.

Kata Kunci: Kepulauan Spratly, *bandwagoning*, Filipina, Tiongkok, Agresivitas

Abstract

This study aims to describe the Philippines' strategy in responding to China's aggression in the Spratly Islands. The author uses the concept of bandwagoning to answer the Philippine strategy. Bandwagoning is the attitude of a country to ally itself with the threatening country for the bandwagoning country. The type of research is descriptive qualitative, using secondary research data and data analysis techniques with a literature study. There are four factors in bandwagoning, namely aggregate power, geographic proximity, offensive power, and aggressive intention. Based on the results of the study, the factors of geographic proximity and aggressive intention show that China is a real threat to the Philippines. Through the factors of aggregate power and offensive power, it appears that China has vast resources, so the Philippines has the opportunity to cooperate with China in order to defend the Spratly Islands. This cooperation process is called the bandwagoning strategy. The Philippines cooperates through economic and security cooperation.

Keywords: Spratly Islands, *bandwagoning*, Philippines, China, Aggressiveness

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Andha Umar Auf Rabbani, Rendy Wirawan

1. PENDAHULUAN

Kawasan Laut Tiongkok Selatan hingga saat ini masih menjadi kawasan yang menarik perhatian banyak negara. Letak geografis Laut Tiongkok Selatan berada di kawasan Asia Pasifik. Laut Tiongkok Selatan juga berbatasan dengan sejumlah negara seperti, Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan, Singapura dan Filipina. Laut Tiongkok Selatan memiliki luas sekitar 8.000 km² yang di dalamnya terdapat banyak pulau salah satunya Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly terdiri dari ratusan pulau kecil dan terumbu karang. Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan Laut Tiongkok Selatan yang terbentang dari Singapura di barat daya hingga ke Taiwan di bagian timur laut (Nasir & Dahalan, 2017). Kepulauan Spratly ini juga ditempati sejumlah negara yaitu Filipina, Tiongkok, Taiwan, Malaysia dan Vietnam. Negara Tiongkok membuat klaim yang kontroversial yaitu adanya klaim *nine dashed line*.

Gambar 1. Peta Klaim *nine dash line*



Sumber: The Economist, 2014

Garis putus-putus berwarna merah diatas merupakan *Nine Dash Line* atau Sembilan garis putus-putus. *Nine dash line* merupakan istilah yang dibuat oleh Tiongkok yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tiongkok pada tahun 1947. Tiongkok mengatakan bahwa *Nine Dash Line* ialah bagian dari hak historis wilayah kedaulatan Tiongkok (ICAS, 2023). Klaim yang dilakukan Tiongkok tersebut menjadi kontroversial karena klaim tersebut tumpang tindih dengan negara negara yang menempati Kepulauan Spratly. Adanya klaim *nine dash line* tersebut membuat Kawasan Kepulauan Spratly menjadi Kawasan konflik. Filipina mulai berkonflik dengan Tiongkok mengenai Kepulauan Spratly sejak tahun 1995 (Inuhan et al., 2021). Puncaknya pada tahun 2011-2012 ketika terjadi insiden bentrokan kapal survey minyak Filipina dan kapal

patroli Tiongkok di Kepulauan Spratly. Pemerintah Filipina mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok adalah agresif.

Hingga di tahun 2013 Filipina mengajukan ke lembaga pengadilan arbitrase internasional yaitu *permanent court of arbitration* (PCA). Pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan keputusannya. PCA memutuskan memenangkan Filipina, PCA juga mempertegas Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Filipina merupakan bagian zona ekonomi eksklusif (ZEE). Oleh karena itu Filipina berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusifnya (*press-release* PCA, 2016). Kemudian PCA juga memutuskan klaim nine dash line Tiongkok merupakan klaim yang tidak sah sehingga Tiongkok tidak berhak mengklaim kedaulatan sepenuhnya Kepulauan Spratly (*press-release* PCA, 2016). Atas keputusan tersebut, Filipina menyambut baik keputusan yang dikeluarkan PCA sementara Tiongkok secara tegas tidak menerima dan tidak mengakui putusan PCA (Zebua & Shiddiqiy, 2025). Meskipun Filipina menang dalam proses arbitrase PCA namun Keputusan tersebut masih belum cukup. Karena keputusan PCA tidak mengikat, tidak adanya sanksi jika tidak mematuhi keputusan tersebut. Hal itu terbukti ketika pemerintah Tiongkok menolak keputusan PCA serta Tiongkok masih tegas mengenai klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu menarik untuk melihat langkah strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly.

2. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian penulis yaitu mengetahui dan menggambarkan strategi Filipina maka jenis penelitian penulis ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang ditujukan untuk memberikan fakta fakta dan gejala gejala sebuah fenomena secara sistematis dan akurat, mengenai sifat sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al, 2020). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan (Hikmawanti F, 2020). pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak sebelumnya atau tidak secara langsung diteliti penulis melainkan

melalui media perantara. Berhubungan dengan data penelitian penulis yaitu menggunakan data sekunder maka dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan lebih banyak menggunakan studi pustaka atau library research. Kemudian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan analisis yang berlandaskan pandangan postpositivisme menganggap realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan hubungan gejala yang interaktif (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geopolitik Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly merupakan Kepulauan yang terletak di Laut Tiongkok Selatan bagian Selatan. Kepulauan ini terdiri dari ratusan pulau dan ratusan terumbu karang. Wilayah Kepulauan Spratly membentang seluas 410.000 Km² (Fatmawati, 2019). Kepulauan Spratly berposisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Yuniati & Susilo, 2013). Jumlah pulau diperkirakan hingga 650 namun jumlah pulau di Kepulauan Spratly tidak pasti karena banyak pulau yang tidak bertahan lama dan terendam oleh air laut. Kepulauan Spratly juga memiliki sumber daya alam melimpah. Sumber daya yang dapat membantu untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekayaan Kepulauan Spratly terdapat perikanan, Cadangan minyak yang melimpah sekitar 105 Miliar barel dan hidrokarbon berupa gas alam sekitar 60%-70% (Karmilawaty & Janvy, 2024). Selain kekayaan sumber daya alam, Kawasan Kepulauan Spratly juga menjadi wilayah yang strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Filipina merupakan salah satu negara yang menguasai beberapa pulau di Kepulauan Spratly. Filipina menempati 9 pulau di Kepulauan Spratly yaitu Pulau Thitu, Nanshan, Flat, Lankiam Cay, Commodore Reef, West York, Loaita, Second Thomas Shoal dan Northeast Cay (Inuhan et al., 2021). Selain Filipina kawasan Kepulauan Spratly diklaim oleh sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Beberapa negara menamai Kepulauan Spratly dengan nama yang berbeda beda. Filipina menyebut Kepulauan Spratly ialah Kepulauan Kalayaan, Tiongkok menyebut Nansha Quadao, Taiwan menyebut Shinnegunto, Vietnam menyebut dengan Dao Truong Sa, Malaysia menamai Terumbu Layang (Pamungkas, 2013).

Gambar 2. Peta Klaim negara negara di Kepulauan Spratly



Sumber: Wirdth, 2021

Gambar diatas merupakan peta negara negara yang mengklaim Kepulauan Spratly Karena Kepulauan Spratly menjadi bagian perairan ZEE Brunei Darussalam (Nasir & Dahalan, 2017). Klaim *nine dash line* Tiongkok membuat situasi menjadi rumit karena klaim tersebut mengklaim keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly. Pada tahun 1947 Tiongkok membuat peta yang di dalamnya terdapat 9 garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan. Peta yang dibuat oleh Tiongkok tersebut mencakupi keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan menurut Pemerintah Tiongkok klaim Kepulauan Spratly berdasarkan hak historis. Wilayah Laut Tiongkok Selatan pertama kali ditemukan oleh Dinasti Han pada abad ke 2 M (Masehi).

Pengakuan kedaulatan wilayah suatu negara terdapat dua yaitu secara *de facto* yang berdasarkan fakta, *de facto* merujuk pada keadaan yang ada dalam kenyataan atau fakta di lapangan tanpa pengakuan resmi dari hukum internasional (Rombot et al.,2023). Pengakuan kedua yaitu secara *de jure* berdasarkan hukum, *de jure* pengakuan secara resmi dan sah menurut hukum dan norma norma internasional (Rombot et al.,2023). Dalam Kepulauan Spratly Tiongkok dan Taiwan mengklaim secara *de facto* sedangkan Filipina, Vietnam, Malaysia, mengklaim secara *de facto* dan *de jure*. dan Brunei Darussalam mengklaim secara *de jure*.

Vietnam menguasai 9 pulau di Kepulauan Spratly, dasar klaim Vietnam ialah secara *de facto* dan *de jure*. Pertama secara *de facto* yaitu dengan dasar historis melalui dokumen sejarah dinasti Nguyen di abad 17. Lalu klaim Vietnam juga berdasarkan warisan kolonial Prancis yang dianeksasi resmi pada tahun 1933 (Quy, 2014).

Kemudian klaim Vietnam juga berdasarkan secara *de jure*. Sebagian wilayah Kepulauan Spratly merupakan bagian dari Vietnam berdasarkan aturan UNCLOS Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dan landasan kontinen (Kraska, 2016).

Selanjutnya, Taiwan mengklaim satu pulau di Kepulauan Spratly bernama Pulau Taiping. Dasar klaim Taiwan sama dengan Tiongkok ialah secara *de facto* melalui hak *historis* yang menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian wilayah tradisional mereka sejak masa lalu. Klaim ini juga berakar pada penerimaan penyerahan wilayah dari Jepang setelah perang dunia II serta keberlanjutan klaim dari pemerintahan Tiongkok nasionalis (Kuomintang) yang kemudian berpindah ke Taiwan (Nugraha, 2021).

Malaysia secara *de facto* menguasai 5 pulau di Kepulauan Spratly dan menempatkan fasilitas militer di beberapa pulau yang dikuasai Malaysia (Sihite, 2016). Secara *de jure* klaim Malaysia juga sejalan dengan aturan UNCLOS yaitu ZEE 200 Mil Laut dari garis pantai mereka (Nasir & Dahalan, 2017). Terakhir Brunei Darussalam tidak menguasai pulau yang ada di Kepulauan Spratly namun Brunei mengklaim satu pulau di Kepulauan Spratly yaitu *Louisa Reef*. Dasar Klaim Brunei ialah secara *de jure*, pulau tersebut memasuki zona ekonomi eksklusif Brunei Darussalam (Nasir & Dahalan,

Strategi *Bandwagoning* Filipina

Dibawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang dimulai pada tahun 2016, Filipina melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya terkait Laut Tiongkok Selatan. Kepemimpinan memainkan peran sangat penting dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri Filipina dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah akan menentukan arah kebijakan politik luar negeri Filipina yang akan datang. Rodrigo Duterte menggantikan Benigno Aquino III sebagai Presiden Filipina, membuka babak baru dalam politik luar negeri Filipina. Kepentingan akan selalu ada dalam kebijakan luar negeri sebuah negara.

Pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte, terdapat kebijakan domestik Filipina yang kontroversial yaitu menerapkan hukuman mati kepada mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. berbagai upaya dilakukan Presiden Rodrigo Duterte untuk menuntaskan masalah kriminalitas dan kejahatan di negaranya, karena itu ribuan orang meninggal akibat sanksi tegas Duterte (Beatrice, 2020). Kebijakan presiden Rodrigo Duterte dikritik karena berlebihan dan melanggar hak asasi manusia oleh

beberapa pihak internasional seperti PBB dan Parlemen Uni Eropa. Amerika Serikat sebagai negara sekutu Filipina selama bertahun-tahun menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan yang dijalankan Rodrigo Duterte. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barrack Obama mengecam kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Hubungan Filipina dan Amerika Serikat semakin memburuk ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan embargo senjata terhadap Filipina (Beatrice, 2020). Presiden Rodrigo Duterte memutuskan untuk mengakhiri kebijakan politik luar negeri Filipina bersama Amerika Serikat, yang selama ini selalu bergantung dengan Amerika Serikat. Duterte mengatakan bahwa Filipina telah menghidupkan hubungannya dengan Tiongkok (Beatrice, 2020). Selain itu kepentingan nasional Filipina mengenai kehidupan rakyatnya yang bergantung pada Laut Tiongkok Selatan atau yang mereka sebut Laut Filipina Barat menjadi sumber kebijakan politik luar negeri Filipina. Pendekatan Filipina ke Tiongkok terlihat ketika Duterte melakukan kunjungan pertama kali ke Tiongkok pada Oktober 2016. Kunjungan kenegaraan tersebut merupakan kunjungan pemimpin Filipina pertama kali sejak tahun 2011 untuk membahas mengenai meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Tiongkok merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Duterte diluar negara-negara ASEAN semenjak Duterte menjabat. Pendekatan Filipina terhadap Tiongkok merupakan sikap *bandwagoning* karena beraliansi dengan negara ancaman yang dimana negara ancaman di kasus ini ialah Tiongkok.

Dalam menggunakan strategi *bandwagoning* perlu mengklasifikasikan berbagai ancaman terlebih dahulu agar membuktikan negara yang menjadi ancaman memberikan ancaman yang nyata bagi negara pelaku *bandwagoning*. Stephen M Walt (1985) mengatakan ada 4 faktor yang dapat diukur untuk menentukan negara menjadi ancaman yaitu, *geographic proximity*, *aggregate power*, *offensive power* dan *aggressive intention*. Kemudian Walt juga menyampaikan ada 3 kondisi yang ikut mendorong negara melakukan *bandwagoning* yaitu, kondisi adanya posisi negara kuat dan lemah, kondisi tidak adanya aliansi atau sekutu dan kondisi negara lemah akan cenderung oportunis.

Faktor pertama yang menjadi ancaman suatu negara ialah *Geographic Proximity*. Kedekatan geografis atau *geographic proximity* yang berarti berkaitan dengan jarak

antara negara yang terancam dan negara pengancam. Dengan jarak yang lebih jauh, prediksi kekuatan negara semakin terbatas yang berarti potensi ancaman semakin kecil. Tiongkok dan Filipina berada di benua yang sama yaitu benua Asia namun Tiongkok dan Filipina di kawasan Asia yang berbeda. Jarak terdekat Filipina ke Tiongkok ialah melalui Scarborough Shoal yang berjarak 530 mil laut atau 830 Kilometer dari pantai Tiongkok terdekat yaitu Pulau Hainan (Wang, 2016). Wilayah Scarborough Shoal merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan dan wilayah ini selalu menjadi konfrontasi Tiongkok dengan Filipina. Hal tersebut selalu memberi kekhawatiran bagi Filipina karena jarak Scarborough Shoal hanya 138 mil atau 222 Kilometer dari ibu kota Filipina Manila (Wang, 2016). Kawasan Scarborough Shoal pernah menjadi tempat konflik antara Tiongkok dan Filipina. Pada tahun 1998 tentara Angkatan Laut Tiongkok bentrok dengan nelayan Filipina di Scarborough Shoal. karena penempatan rambu rambu penanda Tiongkok di daerah tersebut (Rowan, 2005).

Kemudian kawasan jantung Kepulauan Spratly juga menimbulkan ancaman. Karena seluruh kawasan Kepulauan Spratly merupakan bagian dari *nine dashed line* Tiongkok. Ancaman tersebut berupa Pembangunan landasan pacu, hanggar pesawat, lokasi radar dan tempat perlindungan rudal permukaan ke udara. Pembangunan tersebut berada di tiga terumbu karang yang diklaim Filipina yaitu Fieri Cross, Subi Reef dan Mischief Reef (Avendano, 2017). Dengan demikian dari segi faktor *geographic proximity*, Tiongkok merupakan ancaman bagi Filipina. Meskipun Tiongkok dan Filipina tidak terhubung melalui daratan namun wilayah perairan Filipina terhubung dengan Laut Tiongkok Selatan melalui Kepulauan Spratly. Dengan adanya klaim *nine dashed line* di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok akan memberi ancaman bagi Filipina.

Faktor kedua, adalah *aggregate power* merupakan penilaian kekuatan ancaman berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh negara (Walt, 1985). *Aggregate power* secara umum dapat didasari kemampuan militer, jumlah populasi dan kekuatan ekonomi. Kekuatan tersebut menjadi indikator dari *aggregate power*. Semakin besar *aggregate power* yang dimiliki suatu negara maka semakin besar ancaman yang dapat ditimbulkan. Dalam hal ini akan membandingkan kekuatan dari Tiongkok dan Filipina. Secara jumlah populasi Tiongkok memiliki populasi yang besar yaitu sekitar 1,3 Miliar jiwa sedangkan Filipina memiliki 105 juta jiwa (Worldometer, 2015).

Kemudian dari segi kekuatan ekonomi, GDP Tiongkok senilai 11.007.721 Million US Dollars dan Tiongkok berada di GDP terbesar nomor 2 di dunia pada tahun 2015. Sedangkan Filipina GDP nya senilai 292,451 Million US Dollars dan Filipina berada di peringkat 38 pada tahun 2015 (World Bank, 2015). Selanjutnya dari segi kekuatan militer dalam peringkat kekuatan militer dunia berdasarkan indeks Global Fire Power (2015), pada tahun 2015 Tiongkok berada di peringkat ke 3 sedangkan Filipina berada di peringkat 41 dari 145 negara. Hal ini menunjukkan kapabilitas militer Tiongkok lebih kuat daripada Filipina. Baik dari segi populasi, ekonomi dan militer Tiongkok jauh lebih unggul dari Filipina.

Faktor ketiga, *Offensive Power* ialah kemampuan suatu negara untuk menyerang didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sebagai alat perang. total personel aktif Tiongkok berjumlah 2 Juta lebih sedangkan personel aktif Filipina berjumlah 125 ribu (CSIS, 2017). Karena kasus sengketa *nine dash line* berada di laut maka penulis akan melihat kapabilitas militer di laut. Personel angkatan laut Tiongkok yang aktif pada tahun 2015 berjumlah 235 ribu personel sementara Filipina berjumlah 24 ribu personel (CSIS, 2017). Dalam kapabilitas militer angkatan laut dapat dilihat juga melalui jumlah kapal perang. kapal laut Tiongkok berjumlah 304 kapal sedangkan Filipina 91 kapal. Kemudian Tiongkok juga membangun pulau - pulau buatan untuk pangkalan militer angkatan laut Tiongkok (Philippines Navy, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan dari segi faktor *Offensive Power* Tiongkok dapat menjadi ancaman nyata bagi Filipina. Karena kemampuan *Offensive Power* nya sangat besar. Hal tersebut didukung dengan kapabilitas militer Tiongkok yang sangat mumpuni.

Faktor keempat, *Aggressive Intention* dapat diukur melalui pernyataan pemerintah negara pengancam, kebijakan dan manuver yang diambil oleh negara pengancam yang menunjukkan niat agresif (Walt, 1987). Terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan niat agresif Tiongkok. Seperti pernyataan Tiongkok untuk memperingatkan tidak boleh mengeksplorasi minyak di perairan Laut Tiongkok Selatan (Calica, 2011). Kemudian pernyataan untuk meningkatkan patroli maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Thayer, 2011). Selanjutnya pernyataan dari Presiden Xi Jinping menekankan bahwa Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Xi Jinping beralasan bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah warisan leluhur yang senantiasa akan mendapatkan dukungan dari Tiongkok

(Adiyudha, 2018). Dan pernyataan penolakan Tiongkok terhadap keputusan PCA 2016. Serta *aggressive intention* Tiongkok juga terlihat dari beberapa tindakan Seperti insiden kapal patroli Tiongkok yang intimidatif, pembangunan pulau buatan, pembangunan fasilitas militer di Kepulauan Spratly. Menurut pemerintah Filipina tindakan tindakan yang dilakukan Tiongkok tersebut merupakan aktivitas agresif yang melanggar kedaulatan dan hukum internasional (Farhah, 2017).

Filipina juga melakukan kerjasama dengan Tiongkok diluar masalah Kepulauan Spratly. Berdasarkan faktor *aggregate power* Tiongkok memiliki sumber daya yang besar. Kekuatan ekonomi dan kapabilitas militer Tiongkok sangat kuat daripada Filipina. Menurut Randall Scheweller dalam tulisannya *Bandwagoning For Profit* (1994), Sikap *bandwagoning* bukanlah merupakan sekedar tindakan untuk menghindari ancaman demi keamanan melainkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau nilai tambah (self-extension). Dalam kunjungan tersebut Tiongkok dan Filipina menyepakati kerjasama ekonomi yang menghasilkan beberapa kesepakatan investasi dan pendanaan yang mencapai \$24 Miliar, yang dimana \$15 Miliar untuk proyek investasi dan \$9 Miliar untuk fasilitas kredit (Farhah, 2017). Tiongkok memberikan pinjaman kredit senilai \$9 Miliar, yang termasuk di dalamnya alokasi dana \$15 Juta khusus untuk program rehabilitasi narkoba guna mendukung kampanye anti narkoba Presiden Duterte (Farhah, 2017). Tiongkok juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan volume impor buah buahan dari Filipina dan meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke Filipina (Koty, 2016).

Dalam bidang keamanan Filipina juga membangun kerjasama dengan Tiongkok. Terdapat ancaman internal Filipina yang akan menjadi fokus presiden Duterte dalam mewujudkan keamanan nasional, ancaman tersebut ialah kejahatan internasional dan peredaran narkoba secara ilegal. Filipina meminta bantuan kepada Tiongkok untuk menjaga keamanan nasional. Tiongkok membantu dalam pemberantasan Teroris di kota Marawi Filipina. Bantuan dari Tiongkok berupa senapan peluru dan peralatan senjata jarak jauh yang sangat membantu operasi militer Filipina dan Filipina juga menerima 3000 bantuan senjata dari Tiongkok (Tiezzi, 2018). Selanjutnya, Tiongkok memberikan bantuan dalam mendukung kebijakan *war on drugs* yang bertujuan memberantas peredaran narkoba ilegal yang masif di Filipina.

4. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly melalui strategi bandwagoning. Sikap bandwagoning sendiri ialah bersekutu dengan negara yang merupakan ancaman. Dalam menggunakan strategi bandwagoning perlu mengidentifikasi terlebih dahulu negara yang menjadi ancaman yang dimana di penelitian ini Tiongkok adalah negara ancaman bagi Filipina. Melalui Faktor *geographic proximity* dan *aggressive intention* menunjukkan ancaman yang nyata dari Tiongkok. Strategi *Bandwagoning* Filipina tercermin ketika Filipina melakukan pendekatan kerjasama bersama Tiongkok. Pendekatan Filipina ini terjadi ketika era Presiden Rodrigo Duterte tahun 2016-2022. Berdasarkan faktor *aggregate power* dan *offensive power* Tiongkok memiliki sumber daya yang besar baik dari kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer jauh dibanding Filipina. Sehingga Filipina melakukan *bandwagoning* agar dapat menghindari ancaman dan juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Tiongkok.

Melalui sikap *bandwagoning* tidak hanya terhindar dari ancaman namun mendapatkan keuntungan dengan negara ancaman karena negara yang menjadi ancaman adalah negara yang kuat, keuntungan tersebut dapat dihasilkan melalui kerjasama. Dalam praktiknya Filipina memperkuat hubungan bilateral Filipina dengan Tiongkok melalui berbagai mekanisme, seperti *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM), melalui BCM ini Filipina mendapatkan keuntungan berupa sumber daya alam di Kepulauan Spratly kemudian di mekanisme *Joint Coast Guard Committee* (JCGC), Filipina bekerjasama keamanan maritim bersama Tiongkok. Filipina juga melakukan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Tiongkok untuk internal Filipina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyudha R. (2018). Xi Jinping tak akan kaki dari laut China Selatan. Republika. <https://internasional.republika.co.id/berita/pb0pwq366/xi-jinping-tak-akan-angkat-kaki-dari-laut-cina-selatan>
- Global Fire Power (2015). World Military Strenght Ranking. <https://share.google/rCfqNvrq8pugltJRj>
- Hardani, Auliya & Andriani. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group
- Hikmawati F (2020). Metodologi Penelitian. <https://share.google/dlmopAQb2tMEmxFHs>
- ICAS. (2023). *Nine dash line*. <https://share.google/dTpdyp0M0hXLKb13g>

- Inuhan, et al. (2021). Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Sparty). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3),192–205. [Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan \(Kepulauan Sparty\) | Inuhan | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum](#)
- Karmilawaty R & Janvy C. (2023). Agresivitas Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa Wilayah dengan Filipina di Pulau Thitu. *Bhuvana. Journal of Global Studies*.2(2).203-223.<https://jurnalhiusni.org/index.php/bhuvana/article/view/51/59>
- Koty A. (2016). *China-Philippine Relations: Implications for Foreign Investment*. <https://www.china-briefing.com/news/china-philippines-relations-implications-foreign-investment/>
- Mogato. (2018). Philippines, China to work out how to tap oil, gas that both sides claim. Reuters. <https://www.reuters.com/article/markets/currencies/philippines-china-to-work-out-how-to-tap-oil-gas-that-both-sides-claim-idUSKCN1FY0LM/>
- Nasir & Siti. (2017) Penyelesaian pertikaian Kepulauan Sparty. Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan bersama di bawah UNCLOS 1982, VI(1), 19-40. [https://repository.unimal.ac.id/5600/1/1.%20PENYELESAIAN%20PERTIKAIAN%20KEPULAUAN%20SPRATLY MEMANFAATKAN%20PERJANJIAN%20PEMBANGUNAN%20BERSAMA%20\(Reusam\).pdf](https://repository.unimal.ac.id/5600/1/1.%20PENYELESAIAN%20PERTIKAIAN%20KEPULAUAN%20SPRATLY%20MEMANFAATKAN%20PERJANJIAN%20PEMBANGUNAN%20BERSAMA%20(Reusam).pdf)
- Nugraha Ogi, (2021) Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN, XI (4), 25-42.<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/414>
- Pamungkas H. (2013). Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat Pada Sengketa Kepulauan Spratly tahun 2011.[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhit ya% 20Yanuar%20Pamungkas.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhit%20Ya%20Yanuar%20Pamungkas.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Permanent Court Arbitration. (2016). *The South China Sea Award*. <https://pcacases.com/web/sendAttach/2086>
- Phil Star. (2023). *AFP reports swarming of more than 50 Chinese vessels in West Philippine Sea*. Philstar. <https://www.philstar.com/headlines/2023/07/07/2279372/afp-reports->
- Philippine Coast Guard . (2023). *PCG statement on Chinese vessel using laser at PCG ship in Ayungin*. <https://coastguard.gov.ph/index.php/11-news/5001-pcg-statement-on-chinese-vessel-using-laser-at-pcg-ship-in-ayungin>
- Quy Ho, (2014). The Process of Possessing and Exercising Sovereignty of Vietnam Over the Paracel and Spratly Islands - True Uninterrupted, Peaceful and Transparent, VIII(2),3-18. <https://vjol.info.vn/index.php/ssirev/article/download/21855/18662/>
- Rombot et al, (2023). Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional XII (2) (1-13). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51207/44065>